

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan bisnis terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun yang tidak langsung tentu memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan yang berada di sekitar bisnis tersebut seperti menimbulkan polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Adanya dampak pada lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial atau yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Saat ini seluruh perusahaan berbagai sektor bisnis di Indonesia sebagian besar mengklaim bahwa perusahaan mereka telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, oleh karena itu, sebagian besar perusahaan tersebut melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Selain usaha perbaikan terhadap lingkungan, perusahaan juga berpartisipasi didalam pengabdian kepada masyarakat, seperti memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan tingkat pendidikan masyarakat, pelayanan kesehatan dan sebagainya. (Fr. Reni, 2006)

Corporate social responsibility merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single*

bottom line. Tanggung jawab sosial harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memerhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). *Triple bottom line reporting* merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sebuah entitas. Apabila prinsip *Triple bottom line reporting* dapat di implementasikan dengan baik, maka akan menunjukkan bahwa akuntabilitas perusahaan tidak hanya untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan (Deegan 2004). Dengan demikian prinsip *Triple bottom line reporting* dapat mengakomodasikan kepentingan *stakeholder* secara luas, tidak hanya kepentingan *stakeholder* dan *bondholder* saja.

Sekarang kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin, apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat, dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya. Dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan perusahaan, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial (Haniffa dan Cooke, 2005). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sayekti dan Wondabio (2007) dalam Machmud dan Djakman (2008) yang menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia juga terjadi karena lemahnya penegakan peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, misalnya tentang aturan ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, perimbangan bagi hasil suatu industri dalam era otonomi daerah (Eka, 2011). Selain itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf 12 perusahaan masih bersifat sukarela dalam mengungkapkan CSR kepada publik melalui laporan tahunan perusahaan.

Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten dan Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang meliputi: Eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, pengangkutan mineral/bahan tambang. Industri pertambangan selain mendatangkan devisa dan menyedot lapangan kerja juga rawan terhadap pengrusakan lingkungan. Banyak kegiatan penambangan yang mengundang sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang selain merusak lingkungan juga membahayakan jiwa penambang karena keterbatasan pengetahuan sipenambang dan juga karena tidak adanya pengawasan dari dinas instansi terkait (Yudhistira, 2008 dalam Ahyani 2011). Seperti juga perusahaan pertambangan raksasa, masyarakat yang menambang ini juga dituding sebagai sumber terjadinya degradasi lingkungan. Meskipun dianggap termasuk sebagai pemicu peristiwa degradasi lingkungan, ancaman yang paling serius dari mereka

ternyata adalah adanya pencemaran merkuri. Pencemaran ini terjadi sebagai akibat para penambang (dalam hal ini adalah penambang emas primer) tersebut menggunakan merkuri dalam usaha memisahkan emas dari material pembawanya. Selanjutnya merkuri yang tercampur dengan dengan air buangan kemudian mencemari air tanah dan sungai.

Terdapat contoh kasus, terkait permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya kurang memerhatikan kondisi lingkungan dan sosial sekitarnya, khususnya perusahaan yang aktifitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (ekstraktif). Sebagai contoh, Belakangan gencar pemberitaan mengenai kasus pembunuhan Bp. Salim Kancil, seorang petani sekaligus aktivis lingkungan penolak penambangan pasir ilegal di Kab. Lumajang Jawa Timur. Beliau tewas dibunuh oleh preman dan oknum pro penambangan pasir yang diduga adalah anak buah dari penguasa desa setempat. Dilihat dari sisi pemanfaatan lahan, kegiatan penambangan pasir ilegal di Kab. Lumajang itu sendiri sebenarnya tidak menyalahi arahan guna lahan sebagai area pertambangan galian B dan C. Bahkan sudah ada beberapa perusahaan penambangan yang diberikan izin operasional. Namun di Tahun 2014, Dinas ESDM pemerintah setempat mewajibkan perusahaan pertambangan agar dilengkapi smelter sehingga beberapa perusahaan menghentikan usahanya karena belum memenuhi aturan tersebut termasuk PT. IMMS di Desa Selok Awar-Awar.

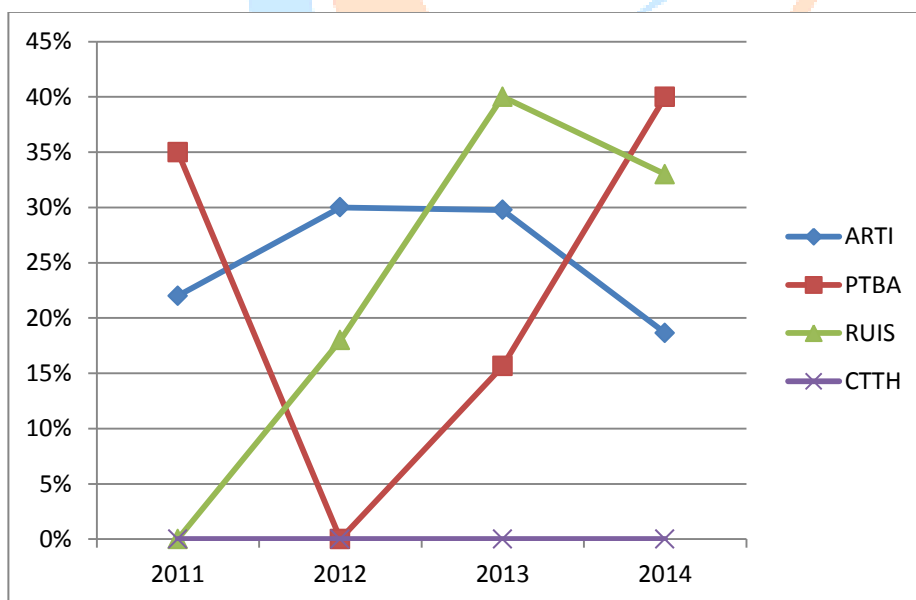
Sadar akan nilai komersial sumberdaya pasir tersebut, beberapa oknum tetap melakukan penambangan ilegal baik secara modern maupun tradisional. Masyarakat tetap aktif menambang pasir bahkan beberapa pemangku kekuasaan tetap

mengeksploitasi pasir secara besar-besaran. Isu yang berkembang mengarah bahwa para pejabat daerah yang memanfaatkan akses dan kewenangan terhadap wilayah tersebut berusaha mendapatkan keuntungan pribadi melalui bisnis penambangan pasir ilegal. Dalam hal ini peran pemangku kewenangan dalam pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam menjadi point utama. Pemangku kewenangan berfungsi sebagai pengontrol agar perencanaan pembangunan (dalam hal ini berbentuk peraturan dari Dinas ESDM Lumajang) dapat diimplementasikan dengan baik. Namun penyelewengan justru diduga dilakukan oleh pemangku kewenangan (dalam hal ini kepala desa) yang justru melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin / ilegal. Akibat penambangan pasir ilegal yang dilakukan secara intensif dan bersifat eksploitasi, maka kondisi sawah-sawah di daerah tersebut menjadi rusak sehingga para petani kehilangan mata pencahariannya. Selain itu, penambangan tersebut juga merusak alam secara setempat karena dilakukan tanpa ijin dan tindakan konservatif lainnya. Hal inilah yang mendorong petani sekaligus aktivis lingkungan menolak keberadaan penambang pasir Lumajang tersebut. Dalam hal ini peran masyarakat atau para petani tersebut adalah sebagai aktor pengawasan terhadap implementasi rencana pembangunan/kegiatan pemanfaatan guna lahan.

Jika dilihat dari kasus diatas, masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini

tidak bisa menjadi hal marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan.

Kepemilikan saham publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Mulyono, 2010). Semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Rahajeng, 2010). Perusahaan yang memiliki pemegang saham publik akan terdorong untuk mengungkapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* lebih banyak (Cahyono, 2010)



Sumber: www.idx.co.id periode 2011-2014 data diolah.

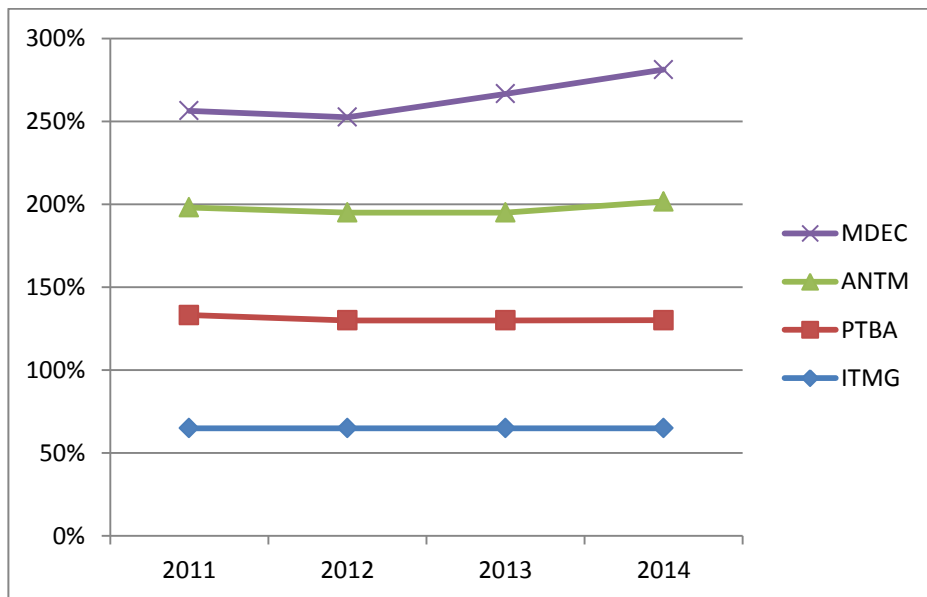
**Gambar 1.1 Grafik Kepemilikan Saham Publik pada Beberapa Perusahaan
Pertambangan Tahun 2011-2014**

Berdasarkan gambar grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa presentase kepemilikan saham publik PT. Ratu Prabu Energi (ARTI) mengalami penurunan sebesar 18,65% pada tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2012-2013 yang mengalami kenaikan 30%. Pada tahun 2012 PTBA mengalami penurunan sebesar 34,31 % dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 34,98%. Pada tahun 2013 PT. RUIS mengalami kenaikan 39,26% namun pada tahun 2014 turun menjadi sebesar 32,86%. Pada tahun 2011 PT.CTTH mengalami penurunan sebesar 41,19% dan pada tahun 2012-2014 mengalami kenaikan yang tidak berubah yaitu sebesar 41,20%.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan CSR (Puspitasari dan Eka, 2011). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Acmad Bajuri (2007), Eka (2007) serta Rivi dan Hasan (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain. Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku *opportunistic manajer*. Menurut Mursalim (2007), kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk

mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Pemegang saham institusional juga memiliki *opportunity, resources, dan expertise* untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan.



Sumber: www.idx.co.id periode 2011-2014 data diolah

**Gambar 1.2 Grafik Kepemilikan Saham Intitusional pada Beberapa Perusahaan
Pertambahan Tahun 2011-2014**

Berdasarkan gambar grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa presentase kepemilikan saham institusi pada PT. MDEC pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 75,5% dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 79,49%. Pada tahun 2011-2013 PT.ANTM mengalami presentase yang stabil yaitu sebesar 65% dan mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 71,56%. Pada tahun 2011 PTBA mengalami kenaikan sebesar 68,12% dan mengalami presentase yang stabil yaitu

sebesar 65,017 pada tahun 2012-2013. Pada tahun 2011-2014 PT.ITMG mengalami presentase yang stabil yaitu sebesar 65%

Pada dasarnya penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzi, *et al.* (2007); Machmud dan Djakman (2008); Said, Roshima, Yuserrie dan Hasnah (2009). Penelitian ini dilakukan karena berdasarkan penelitian sebelumnya, masih menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Media Exposure diukur melalui *website* dengan variabel *dummy*, yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR di media *website* dan 0 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan kegiatan CSR di media *website* (Agatha).

Tabel 1.1 *Media Exposure* pada Beberapa Perusahaan Pertambangan Tahun 2011-2014

	2011	2012	2013	2014	Total	Presentase
Mengungkapkan Kegiatan CSR	0	2	3	1	6	0,6%
Tidak Mengungkapkan Kegiatan CSR	4	2	1	3	10	1 %

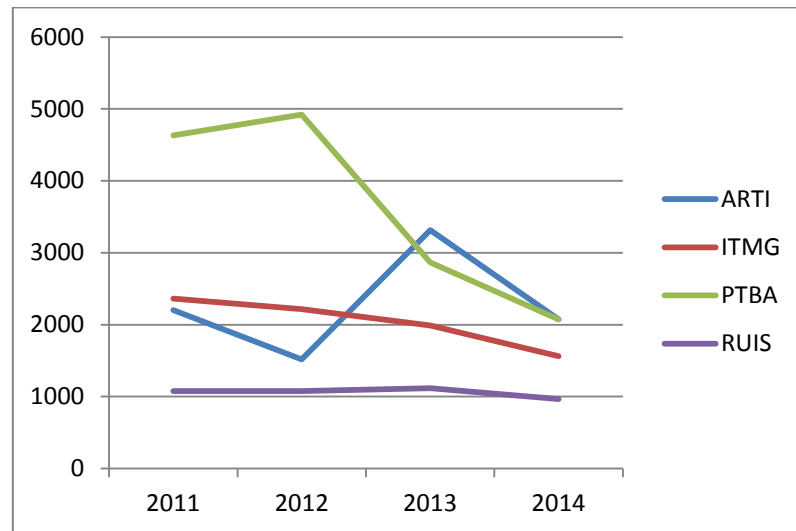
Sumber : website perusahaan pertambangan periode 2011-2014

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan pada industri pertambangan periode 2011-2014 masih banyak yang tidak mengungkapkan kegiatan CSR pada media. Sehingga hasil yang didapat yaitu 0,6% pada perusahaan yang

mengungkapkan kegiatan CSR dan 1% pada perusahaan yang tidak mengungkapkan kegiatan CSR.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2011) dan Reverte (2008) menunjukkan bahwa *Media Exposure* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bansal dan Cleland, 2004; Bansal dan Roth, 2000; Bowen, 2000; Henriques dan Sadosky, 1996) menunjukkan bahwa *Media Exposure* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kemampuan jangka pendeknya. Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan oleh CR. Perusahaan yang likuiditasnya tinggi diharapkan melakukan *disclosure* secara lebih luas. Alasan yang mendasari diharapkan adalah perusahaan yang secara finansialnya kuat akan lebih memngungkapkan secara luas (Wicaksono, 2011)



Sumber: www.idx.co.id periode 2011-2014 data diolah

Gambar 1.3 Grafik *Current Ratio* pada Beberapa Perusahaan Pertambangan

Tahun 2011-2014

Berdasarkan gambar grafik 1.3 di atas dapat dilihat rata-rata *Current Ratio* keempat perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI yaitu PT. Ratu Prabu Energi, PT. Aneka Tambang Raya, PT. Bukit Asam, dan PT. Radiant Utama Interinsco mengalami peningkatan di tahun 2011 yaitu meningkat sebesar 2.569. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1670,25.

Syahrir dan Suhendra (2010) dalam Kamil dan Antonius (2012), menemukan bahwa likuiditas mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Kamil dan Antonius (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas tidak terbukti berpengaruh pada pengungkapan CSR.

Kinerja lingkungan merujuk pada tingkat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat

kerusakan lingkungan yang lebih rendah menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi tingkat kerusakan lingkungannya maka semakin buruk kinerja lingkungan perusahaan tersebut. Penelitian ini memakai hasil penilaian PROPER sebagai indikator kinerja lingkungan perusahaan. PROPER adalah program penilaian kinerja lingkungan perusahaan di Indonesia yang dikembangkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup sejak tahun 1995.

Tabel 1.2 Kinerja Lingkungan

PERINGKAT	2011	2012	2013	2014
EMAS	3	2	3	1
HIJAU	4	4	4	4
BIRU	4	4	4	4
MERAH	0	1	1	1
HITAM	0	0	0	0

Sumber: *website* perusahaan dan *website* KLH periode 2011-2014

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat peringkat “MERAH” pada perusahaan pertambangan dimana peringkat merah dapat di definisikan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksiadministrasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suratno dkk. (2006) Kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap *CSR disclosure*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Dwi Oktalia, 2009), kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

Penelitian ini memilih menggunakan industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014 disebabkan karena industri pertambangan banyak menimbulkan efek lingkungan yang berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dalam proses operasionalnya karena industri pertambangan seringkali meninggalkan polusi udara, pencemaran limbah sisa hasil operasionalnya. Sehingga perusahaan ini perlu menerapkan *Corporate Social Responsibility* untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan oleh industri pertambangan.

Motivasi dilakukannya penelitian ini adalah terjadinya ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu dan banyaknya kasus perusahaan yang dilator belakangi oleh perusahaan pertambangan. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan dan berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti akan menguji variabel apa saja yang berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Maka judul yang akan diangkat oleh peneliti adalah **“Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Kepemilikan Saham Institusi, Media Exposure, Likuiditas, dan Kinerja Lingkungan Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* Pada Industri Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014.**

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Lemahnya penegakan peraturan tentang pengungkapan CSR yang masih bersifat sukarela dalam mengungkapkan CSR kepada publik melalui laporan tahunan perusahaan.
- b. Industri pertambangan kurang memerhatikan kondisi lingkungan dan sosial sekitarnya dalam melaksanakan operasionalnya sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan.
- c. Pertambangan mempunyai risiko relatif yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi sehingga menimbulkan dampak lingkungan baik fisik maupun sosial karena sifatnya yang tidak bisa diperbarui.
- d. Hasil likuiditas pada industri pertambangan fluktuatif.
- e. Hanya sedikit yang mengungkapkan kegiatan CSR pada industri pertambangan
- f. Masih terdapat peringkat “MERAH” pada kinerja lingkungan industri pertambangan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, terjadi beberapa masalah yang muncul dari penerapan CSR, maka penulis membatasi masalah pada :

- a. Peneliti hanya membahas variabel judul yang diangkat menjadi penelitian ini adalah kepemilikan saham oleh publik yang diukur dengan menggunakan rasio jumlah saham yang dimiliki publik dibagi total saham beredar perusahaan. Kepemilikan saham oleh institusi yang diukur dengan menggunakan jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi dengan total saham beredar perusahaan. *Media exposure* diukur dengan menggunakan *variabel dummy* yaitu memberi nilai 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR di media dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan kegiatan CSR di media. Likuiditas diukur dengan menggunakan *current ratio* dimana aktiva lancar dibagi hutang lancar. Kinerja lingkungan diukur menggunakan peringkat PROPER dimana terdapat kriteria peringkat proper yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Dan *CSR disclosure* diukur menggunakan *CSR Disclosure Index*.
- b. Penelitian ini dilakukan pada industri pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- c. Periode penelitian pada industri Pertambangan tahun 2010-2014.

1.3 Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan saham oleh publik, kepemilikan saham institusi, media exposure, likuiditas, kinerja lingkungan *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara simultan pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014 ?

2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan saham oleh publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014 ?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan saham institusi terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014 ?
4. Apakah terdapat pengaruh media exposure terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014 ?
5. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014 ?
6. Apakah terdapat pengaruh kinerja lingkungan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh kepemilikan saham oleh publik, kepemilikan saham institusi, media exposure, likuiditas, kinerja lingkungan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara simultan pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014.

2. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh kepemilikan saham oleh publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014.
3. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh kepemilikan saham oleh institusi terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014.
4. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014.
5. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh media exposure terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014.
6. Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh kinerja lingkungan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* secara parsial pada perusahaan pertambangan periode 2010-2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat berguna bagi :

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai *Corporate Social Responsibility Disclosure* yang disajikan dalam laporan keuangan.

2. Bagi Investor

Dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan referensi dalam melakukan penelitian dengan judul yang sama.

